

ANALIS PEMETAAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEMASAN KEARIFAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN BUTON

*(Mapping And Poverty Alleviation Analysis Based On Socio-Economic Wisdom
Packaging In Buton Regency)*

La Ode Dirman¹, La Ode Suriadi¹, La Bil¹, La Aso¹, Shinta Arjunita¹

¹Universitas Halu Oleo. Kota Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Pada umumnya penelitian ilmiah mengkonsepsikan bahwa orang miskin adalah orang yang selalu kesulitan untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya. Tetapi konsepsi tersebut tidak tuntas menjelaskan dengan sendirinya mengapa dia miskin hanya atas dasar melihat hubungan orang dengan komoditas. Kemiskinan memang menjadi subyek penelitian ilmiah dengan istilah yang beraneka ragam, seperti: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural atau kebudayaan kemiskinan atau Kemiskinan musiman yang secara umum ditekankan pada pemahaman, penjelasan atau pengukuran parameter kemiskinan. Tulisan ini menggunakan metode field research dengan teknik analisis data primer kualitatif secara pusposif yang didukung data sekunder kuantitatif. Karena itu, bahwa kemiskinan lebih ditekankan pada pengukuran lokal kualitatif, faktor penyebabnya dan alternatif penanggulangannya. Faktor penyebabnya antara lain faktor gaya hidup, struktur sosial, faktor historis menyangkut kekuasaan, hegemoni status dan kelas . Aneka program pemerintah yang sdh berlangsung 3 dasarwara, namun prosentase kemiskinan terus bertahan bahkan munculnya orang orang miskin baru. Hal tersebut penanggulangannya lebih pada metode pendekatan ekonomi dan kurang perhatian pada metode pendekatan non ekonomi. Hasil riset menunjukkan bahwa Kemiskinan desa-desa di Kabupaten Buton dominan dikategorikan kemiskinan transien atau kemiskinan musiman yang diselimuti gaya hidup konsumtif sebagaimana karakteristik masyarakat pedesaan. Karena itu, solusi konstruktif pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buton, adalah pemanfaatan modal kearifan sosial ekonomi bentukan masyarakat itu sendiri, sebagai pisau analisis untuk maksimalisasi pemberdayaan ekonomi gotong royong baik tanpa pamrih maupun secara resiprosikal. Akhirnya pemanfaatan pendapatan keluarga melalui pelatihan efektif sistem pendidikan informal lokal dan pemanfaatan bahan bahan alami sesuai potensi sumber daya yang ada di wilayah desa sasaran.

Kata Kunci; Kemiskinan, kekuasaan hegemoni, kemasan dan kearifan.

ABSTRACT

In general, scientific research conceptualizes that poor people are people who always find it difficult to maintain the necessities of life. But that conception incompletely explains itself why he is poor only on the basis of seeing people's relationship to commodities. Poverty is indeed the subject of scientific research with various terms, such as: absolute poverty,

relative poverty, structural or cultural poverty poverty or seasonal poverty which is generally emphasized on understanding, explaining or measuring poverty parameters. This paper uses field research methods with purposive qualitative primary data analysis techniques supported by quantitative secondary data. Therefore, poverty is emphasized more on qualitative local measurements, causative factors and alternative countermeasures. Causative factors include lifestyle factors, social structure, historical factors concerning power, status and class hegemony. Various government programs that have lasted 3 foundations, but the percentage of poverty continues to persist even the emergence of new poor people. This is more on the method of economic approach and less attention to the method of non-economic approach. The results showed that rural poverty in Buton Regency is predominantly categorized as transient poverty or seasonal poverty which is shrouded in a consumptive lifestyle as characteristic of rural communities. Therefore, constructive solutions to poverty alleviation in Buton District, is the use of socio-economic wisdom capital formed by the community itself, as an analytical knife to maximize mutual cooperation economic empowerment both selflessly and reciprocally. Finally, the utilization of family income through effective training of the local informal education system and the utilization of natural materials according to the potential resources available in the target village area.

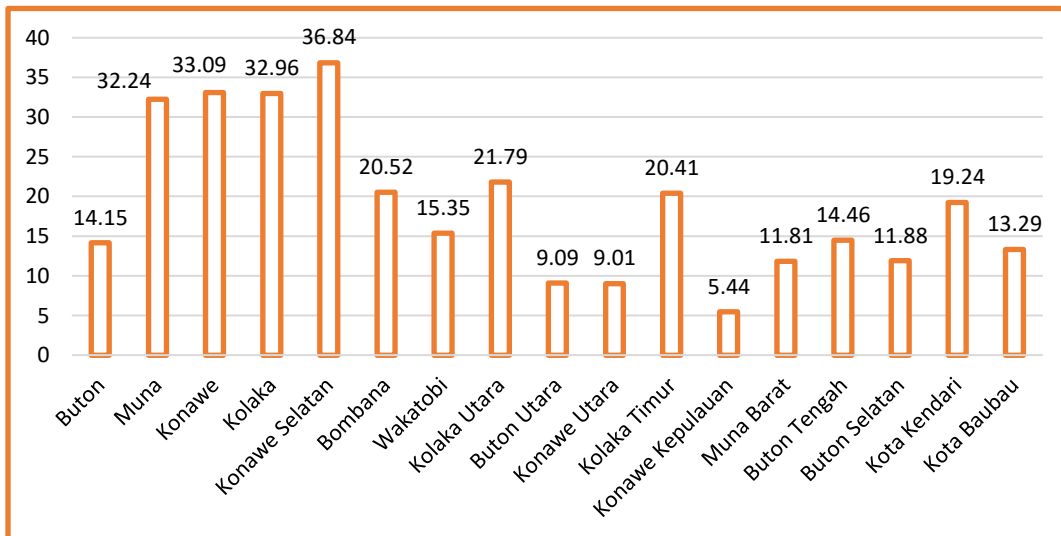
Keywords; *Poverty, hegemonic power, packaging and wisdom*

1. INTRODUCTION

Sejak tiga dekade pemerintah Indonesia merancang aneka strategi menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program. Awal tahun 1990-an Program yang dirancang untuk menanggulangi “kemiskinan sementara” (*transien poverty*) bertujuan untuk mengendalikan dampak krisis ekonomi. Program-program ini berada dibawah payung “Jaring Pengaman Sosial” (JPS). Program ini sesungguhnya saat itu relatif baru yang umumnya dibuat oleh pemerintah. Kemudian, program-program untuk menanggulangi “kemiskinan kronis” (*chronic poverty*) adalah program-program yang bertujuan memberdayakan masyarakat yang berada dalam kemiskinan karena budaya dan atau struktural. Program-program seperti ini merupakan kebijakan yang telah lama ada, baik dirancang oleh pemerintah maupun oleh LSM, dengan atau tanpa bantuan internasional.

Pada tahun 2017, Pemerintah berupaya mengatasi kemiskinan program yang dikemas dalam *Government to Person/G2P* pada delapan (8) bentuk program dalam 25 (dua puluh lima) jenis program (TNP2K, Presiden Republik Indonesia, 2018). Delapan bentuk program masyarakat tersebut dilaksanakan pada delapan bidang sesuai dengan lembaga (Kementerian/Departemen) teknis masing-masing bidang pangan oleh Kementerian Sosial dengan bentuk program adalah Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bidang pendidikan dengan jenis program bantuan adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan PIP untuk siswa sekolah agama oleh Kementerian Agama. Bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat (PIS) oleh Kementerian Kesehatan. Bidang energi dengan program bantuan Subsidi Listrik, Subsidi LPG 3 kg dan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). Bidang sosial dan ekonomi dengan jenis program bantuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan lainnya oleh Kementerian Sosial. Bidang perumahan dengan Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni oleh Kementerian Sosial dan beberapa program bantuan perumahan dan subsidi rumah oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Bidang pertanian berupa Subsidi Pupuk, Asuransi Usaha Tani dan Asuransi Peternak oleh Kementerian Pertanian. Terakhir adalah dibidang kelautan dan perikanan yakni Premi Asuransi Nelayan dan Asuransi Bagi Pembudidaya Ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Akan tetapi berbagai program tersebut diatas, kemiskinan belum dapat terentaskan bahkan munculnya keluarga miskin baru. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada Maret 2021 sebesar 318,7 ribu jiwa. Angka itu meningkat sebanyak 1,38 ribu jiwa atau 0,43% pada September 2020.. Berdasarkan tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan Maret 2021 sebesar 75,05 ribu jiwa, naik 1,83 ribu jiwa dibandingkan September 2020. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan Maret 2021 sebesar 243,65, turun 450 jiwa dibandingkan September 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sulawesi Tenggara turun dari 2,23 % pada September 2020 menjadi 2,16 % pada Maret 2021. Indeks Kemiskinan (P2) juga turun dari 0,62 menjadi 0,56 pada periode yang sama. Di regional Pulau Sulawesi, Sultra berada di posisi ketiga dengan jumlah kemiskinan dan persentase kemiskinan tertinggi pada Maret 2021.



Grambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), Maret 2023

Sumber : <https://sultra.bps.go.id/indicator/23/248/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-sulawesi-tenggara-menurut-kabupaten-kota.html>

Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Tenggara, pengeluaran perkapita masyarakat di Kabupaten Buton tergolong masih sangat rendah. Pengeluaran perkapita rata-rata masyarakat Kabupaten Buton berada pada peringkat ke-15 dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Kabpaten Buton hanya mengalahkan 2 Kabupaten lain yang dulu menjadi bagiannya yaitu Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah.

2. MATERIAL AND METHODS

Tulisan ini menggunakan metode field research dengan teknik analisis data primer kualitatif secara pusposif yang didukung analisis pemetaan data sekunder kuantitatif. Karena itu, bahwa kemiskinan lebih ditekankan pada pengukuran lokal kualitatif, untuk menemukan faktor penyebabnya, implikasi dan alternatif penanggulangannya. Faktor penyebabnya antara lain faktor gaya hidup, struktur sosial (Danadjaja,1988), faktor historis menyangkut kekuasaan, hegemoni status dan kelas (Foucault, 1977, Gramsci, 1971).

Rendahnya rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Buton mengindikasikan tingginya penduduk miskin di daerah ini. Menurut data BPS 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton sebanyak 14,15 ribu jiwa. Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Sulawesi Tenggara seperti Buton Utara, Konawe Utara dan beberapa daerah lainnya, akan tetapi jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain seperti Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan dan beberapa daerah lainnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton tergolong masih rendah. Sementara itu garis kemiskinan di Kabupaten Buton termasuk rendah dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Tenggara. Lewis (1984:29) mengemukakan bahwa sepanjang sejarah, dalam kepustakaan, peribahasa terdapat dua penilaian yang berlawanan mengenai orang miskin; sebagian mencirikan sebagai orang terpuji, rendah hati, jujur, sabar, murah hati, dan yang lain mencirikan sebagai jelek, kotor, kasar, jorok dan jahat.

2.1. Status kesejahteraan

Penduduk Kabupaten Buton di-peta-kan menurut status kesejahteraanya, kedalam 10 bahagian yang sama (desil). Pada setiap desil menjelaskan status kesejahteraan sebagai berikut:

- Desil 1 mencakup Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia,
- Desil 2 mencakup Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia),
- Desil 3 mencakup Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 40% terendah di Indonesia,
- Desil 4 mencakup Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40% terendah di Indonesia.

Pengelompokkan di atas mengacu pada pengelompokan Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Basis Data Terpadu tersebut, berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 yang memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah.

Tabel 2. Jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok usia 5-14, 15-59 tahun dan 60 Tahun ke atas dengan status kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Buton.

Nama Kecamatan	Total	
	Bekerja	Tidak Bekerja
LASALIMU	1.721	3.407
LASALIMU SELATAN	3.091	3.951
SIONTAPINA	2.872	5.022
PASAR WAJO	4.198	8.464
WOLOWA	1.217	1.578
WABULA	740	1.633
KAPONTORI	2.881	3.122
TOTAL :	16.720	27.177

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2021)

2.1.1. Lapangan Usaha Kepada Rumah Tangga

Tabel 3. Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota BUTON

Nama Kecamatan	Jumlah Kepala Rumah Tangga Yang Bekerja		
	Pertanian tanaman padi & palawija	Hortikultura	Perkebunan
LASALIMU	537	2	278
LASALIMU SELATAN	06	40	117
SIONTAPINA	718	59	108
PASAR WAJO	718	90	134
WOLOWA	239	14	34

WABULA	7	4	3
KAPONTORI	364	176	102
TOTAL	3,519	385	776

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2021)

Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten BUTON. Berdasarkan Tabel berikut dapat digambarkan bahwa sebaran jumlah kepala keluarga yang bekerja pada bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan peternakan. Jumlah Kepala Keluarga yang bekerja di bidang perikanan tangkap di Kecamatan Siontapina sebanyak 327 kepala keluarga, 17 keluarga pada bidang perikanan budidaya dan 2 kepala keluarga bekerja di bidang peternakan. Di Kecamatan Lasalimu dan Lasalimu Selatan jumlah kepala keluarga yang bekerja pada bidang perikanan tangkap masing-masing 117 kepala keluarga. Di Kecamatan Pasar Wajo, jumlah kepala keluarga yang bekerja pada bidang perikanan tangkap sebanyak 262 kepala keluarga, sedangkan di Kecamatan Wolowa dan Wabula masing-masing sebanyak 42 dan 216 kepala keluarga yang bekerja di bidang perikanan tangkap.

2.1.2. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Jumlah rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota Buton. Berdasarkan data sebaran status penguasaan bangunan tempat tinggal maka data sebaran yang terbanyak berada di Kecamatan Pasar Wajo sebanyak 2.334 kepala keluarga, kemudian diikuti oleh kecamatan Siontapina sebanyak 1.667 kepala keluarga, kecamatan Lasalimu Selatan sebanyak 1.631 kepala keluarga, kecamatan Kapontori sebanyak 1.467 kepala keluarga, dan Kecamatan Lasalimu sebanyak 1.318 kepala keluarga. Selebihnya dua kecamatan lainnya memiliki status kepemilikan rumah yang sangat sedikit yaitu Wolowa 562 kepala keluarga, Wabula 530 kepala keluarga.

Tabel 4 Jumlah rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati dengan status kesejahteraan 40% terendah Kab/Kota BUTON

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga			
	Milik sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas sewa	Lainnya
LASALIMU	1.318	4	80	14
LASALIMU SELATAN	1.631	7	133	8
SIONTAPINA	1.667	7	104	4
PASAR WAJO	2.334	13	317	20
WOLOWA	562	1	21	7
WABULA	530	-	26	4
KAPONTORI	1.467	2	178	7
	9.509	34	859	64

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2021)

2.1.2.1 Sumber Air Minum Utama

Berdasarkan data diperoleh, maka rumah tangga yang mempunyai akses sumber air ledeng dapat dikatakan masih rendah yaitu sebanyak 1.309 rumah tangga, yang memiliki akses air kemasan hanya 109 rumah tangga, dan sisanya sumber air terlindung sebanyak 6.818 kepala keluarga dan sumber air tidak terlindung sebanyak 2.230 kepala rumah tangga. (Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2021)

2.1.2.2 Sumber Bahan Bakar Utama:

Jumlah rumah tangga yang terbanyak memasak menggunakan arang/kayu yaitu di Kecamatan Pasar Wajo sebanyak 2.429 kepala keluarga, kemudian diikuti oleh empat kecamatan lainnya masing-masing kecamatan Siontapina sebanyak 1.754 kepala keluarga, Kecamatan Lasalimu Selatan 1.743 rumah tangga, Kecamatan Kapontori 1.426 dan kecamatan Lasalimu sebanyak 1.392 rumah tangga. (Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2021)

2.1.2.3 Sumber Penerangan Utama

Jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan utama dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Buton, bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap penerangan lampu yang bersumber dari PLN berada di Kecamatan Pasar Wajo yaitu sebanyak 2.460 kepala keluarga, kemudian di Kecamatan Siontapina sebanyak 1.224 kepala keluarga, Kecamatan Lasalimu 713 kepala keluarga, Kecamatan Lasalimu Selatan sebanyak 676 kepala keluarga, Kecamatan Wabula 517 kepala keluarga dan Kecamatan Wolowa 485 kepala keluarga. Di Kabupaten Buton ternyata masih banyak kepala keluarga yaitu 2.309 rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap penerangan lampu. Kemudian masih terdapat 927 kepala keluarga yang menggunakan listrik non-PLN.

Tabel 5. Jumlah Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Angkatan Kerja	30.436	24.224	54.660
Bekerja	29.495	23.528	53.023
Pengangguran Terbuka	941	696	1.637
Bukan Angkatan Kerja	4.229	11.783	16.012
Sekolah	2.087	1.737	3.824
Mengurus Rumah Tangga	626	9.539	10.165
Lainnya	1.516	507	2.023
Jumlah Total	34.665	36.007	70.672

Sumber: Buton Dalam Angka, 2023

Hal menarik untuk diamati dari informasi penduduk di atas adalah informasi pekerjaan utama yang dilakoni penduduk Kabupaten Buton. Dari 53 ribu Penduduk yang bekerja 80,73 % merupakan pekerja mandiri, buruh/karyawan dan pekerja keluarga. Sedangkan sisanya merupakan pekerja dalam kategori berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap dan berusaha dibantu oleh buruh tetap. Selengkapnya tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut.

Tabel 6. Penduduk Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	11394	4817	16211
Berusaha di Bantu Buruh Tidak Tetap/Tidak dibayar	4098	3678	7776
Berusaha dibantu buruh tetap	2240	202	2442
Buruh/Karyawan/Pegawai	6569	4374	10943
Pekerja Bebas	1349	729	2078
Pekerja Keluaraga/Tidak dibayar	3845	9728	13573
Jumlah	29495	23528	53023

Sumber : DDA Kabupaten Buton, 2023

Pada umumnya penduduk yang bekerja bukan karyawan/pegawai, berusaha sendiri atau dibantu orang lain, memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah. Keadaan ini sering kali memicu permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan terencana dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Buton Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-24	12.406	5.33	17.736
25-30	8.364	5.055	13.419
31-34	4.140	3.821	7.961
35-44	14.140	9.928	24.180
45-54	11.054	10.072	21.126
55-59	3.839	3.317	7.156
60-64	2.728	2.786	5.514
65+	3.235	2.924	6.159

Sumber : DDA Kabupaten Buton 2023

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa kabupaten Buton memiliki kelompok usia produktif yang paling dominan yaitu kelompok usia 35 – 44 tahun dengan jumlah 24.180 orang, kemudian diikuti oleh kelompok usia 45 – 54 sebesar 21.126 orang dan kelompok usia 15 – 24 tahun berjumlah 17.736 orang.. Artinya kelompok usia produktif lebih dominan di Kabupaten Buton. Namun bila kita menengok digram angkatan kerja di atas jumlah pengangguran terbuka dan angkatan kerja masih merupakan kelompok dominan dari jumlah penduduk yang bekerja

2.1.2.4. Pendidikan .

Tabel 8. Jumlah Anak yang Tidak Sekolah, Menurut Usia dengan Status Kesejahteraan 40 % terendah di Kab. BUTON.

Nama Kecamatan	Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah			
	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 16-18 tahun	TOTAL
LASALIMU	196	92	180	468
LASALIMU SELATAN	164	73	148	385
SIONTAPINA	382	192	293	867
PASAR WAJO	272	107	284	663
WOLOWA	88	25	79	192
WABULA	78	44	51	173
KAPONTORI	121	75	159	355
	1.301	608	1.194	3.103

Sumber : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2021)

Sebaran terbesar kedua terdapat di Kecamatan Pasar Wajo sebanyak 663 anak. Dari jumlah tersebut anak usia 7-12 tahun sebanyak 272 anak, anak usia 13-15 tahun sebanyak 107 anak dan anak usia 16-18 tahun sebanyak 284 anak. Selanjutnya Kecamatan Lasalimu

sebanyak 468 anak, terdiri dari anak usia 7-12 tahun sebanyak 196 anak, anak usia 13-15 tahun 92 dan anak usia 16-18 tahun sebanyak 180 anak. Lainnya dapat dilihat pada tabel di atas.

2.1.2.5. Kesehatan

Pada tahun 2018, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 41,08 persen. Kemudian meningkat menjadi 59,02 persen pada tahun 2019, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 65,97 persen, dan begitu juga di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 74,77 persen. Hal ini mengindikasikan jaminan kesehatan semakin tinggi digunakan oleh penduduk Buton yang digunakan untuk berobat jalan pada tahun 2021, yang dapat dikarenakan semakin banyaknya masyarakat mengetahui informasi tentang penggunaan jaminan kesehatan dan semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan.

3. DISCUSSION (RESULTS & DISCUSSION)

3.1. Metode Garis kemiskinan

Ada dua sisi menganalisis situasi dalam kegiatan tersebut pertama, masalah ukuran kemiskinan dan masalah pemberdayaan.

Dasar mengukur tingkat kemiskinan, Bank Dunia (2008) membedakan tiga kategori kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan Kultural. Kemiskinan kultural erat kaitannya dengan istilah kemiskinan natural atau dapat diusulkan sebuah konsep “kemiskinan musiman atau kemiskinan gaya hidup (poverty of life style). Istilah kemiskinan *absolut* artinya penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM) bahwa kemiskinan ditentukan oleh individu atau rumah tangga bukan oleh lingkungannya, kemiskinan *relatif* berarti penghasilan yang diperoleh berada di bawah penghasilan rata-rata masyarakat dimana dia berada. Untuk menentukan poverty line (garis kemiskinan) kategori diatas garis atau di bawah garis kemiskinan. Sayogyo menggunakan 3 jenis KFM (kebutuhan fisik minimum): ekivalen beras terhadap pendapatan, dengan empat kategori penduduk:

Tabel 9. Garis Sajogyo

Garis Kemiskinan	Perkotaan	Pedesaan
(Kg setara beras / kepala / pertahun)		
Sangat Miskin	270	180
Cukup Miskin	360	240
Miskin	480	320

Sumber: Cess 2003

Booth mempertegas kritiknya terhadap Sajogyo dengan mempertanyakan rasio garis kemiskinan perkotaan-pedesaan Sajogyo yang tidak stabil, terutama jika mempertimbangkan tingkat inflasi perkotaan-pedesaan Jawa-luar Jawa. Oleh karena garis Sajogyo adalah garis setara beras, garis ini selalu tetap sepanjang waktu. +Sedangkan indeks harga selalu berubah dari antar waktu dan antar tempat, misalnya antara pedesaan di Jawa dan luar Jawa. Kemudian, Jawa adalah produsen beras sementara luar Jawa adalah pengimpor beras. Meskipun Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori terendah berada di bawah garis kemiskinan, tetapi perlu dicermati bahwa dinamika perubahan kemiskinan bergerak cepat, maka menarik untuk mencermati strategi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di Daerah Buton.

Tulisan Xiuqing et all (2009) berjudul *China's Rural poverty Line and The determinants of Rural Poverty*, menjelaskan mengenai garis kemiskinan di pedesaan di China

dan faktor penyebab kemiskinan. Ia menggunakan dua parameter mengukur tingkat kemiskinan yakni garis kemiskinan standar Bank Dunia sebesar US \$ 1/hari perorang dan garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah China Y 637/tahun. Ia berkesimpulan bahwa perhitungan menentukan batas garis kemiskinan. Mengacu konsep tersebut diatas ada relevansinya dengan temuan **Xiuqing et all** (2009) menunjukkan bahwa garis kemiskinan menurut ukuran kalori sebagaimana Metode BPS, tidak sepenuhnya mencerminkan situasi kemiskinan regional tanpa mempertimbangkan perubahan struktur konsumsi dan perubahan harga pangan.

Variasi metode ukuran kemiskinan yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa sebuah pendekatan penanggulangan kemiskinan bersifat kontekstual untuk selanjutnya mengkaji faktor penyebabnya secara multi dimensi. di Indonesia yang multikultural, ukuran kemiskinan selain faktor kalori dipengaruhi gaya hidup konsumtif, pola dan jenis makanan yang semuanya syarat dipengaruhi nilai kultural.

3.2. Faktor Penyebab kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan dan pengentasannya bersifat multidimesional diantaranya faktor nilai dan politik, kekuasaan, pendidikan, kesehatan, diskriminasi, gender, kelas. Karena itu pengkajiannya dilakukan secara kontekstual. Kelemahan mendasar dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini disampaikan oleh Ritonga (2003) antara lain adalah: (1) pembangunan terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan, (2) cenderung lebih menekankan pendekatan sektoral yang kurang terintegrasi, dan (3) kurang mempertimbangkan persoalan-persoalan kemiskinan yang multidimensi (Ritonga, 2003). Kegagalan pengentasan kemiskinan oleh Suharto (2005) juga dari faktor metode dan paradigma pendekatan, sebab hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi dan paradigma yang bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang berpusat pada produksi. Metode yang digunakan masih belum mencerminkan dinamika kemiskinan karena belum mampu menggali akar penyebab kemiskinan menurut konsep masyarakat miskin itu sendiri, bukan menurut orang luar.

Inisiatif yang akan diambil adalah berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dibutuhkan tindakan pemerintah dan masyarakat untuk merubah pola-pola produksi, pranata sosial yang bersifat produktif, pengelolaan pendidikan yang berpihak pada keluarga miskin, pola-pola pemilikan tanah, mengurangi investasi padat modal, mengarahkan kekuatan-kekuatan pasar, mempengaruhi perubahan nilai-nilai, dan mengatur kegiatan-kegiatan perdagangan antar desa, kecamatan dan wilayah di Daerah Buton. Masalah politik yang paling sulit dilihat dari pandangan menanggulangi kemiskinan ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan ini kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan material pribadi dari kelompok-kelompok elit juga bertentangan dengan beberapa kepentingan pemerintah pusat dimana elite-elite politik dan ekonomi daerah mempunyai hubungan yang erat dengan mereka. Jadi, agar kemiskinan itu dapat berhasil dihapuskan maka Pemerintah Daerah Buton harus bertindak untuk mengatasi hambatan-hambatan oposisi politik dan hambatan-hambatan struktural dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Variasi metode dan pendekatan penanggulangan pada berbagai negara dan pelbagai daerah di Indonesia, antara lain; Tulisan Mok. C Gan dan Sanyal (2007) dalam penelitiannya faktor penyebab kemiskinan di Malaysia. Ia menganalisis bahwa sejak kemerdekaan tahun 1950-an berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun terjadi peningkatan angka kemiskinan yang kemudian diperburuk pada tahun 1997. Hal tersebut disebabkan adanya

urbanisasi di Malaysia. Artikel Yohana Kehler (2001) membahas tentang wanita dan kemiskinan dalam konteks Afrika Selatan. Realitas perempuan di Afrika Selatan ditentukan oleh akses berbasis ras, kelas, dan gender terhadap sumber daya dan peluang. Hal tersebut merupakan faktor penentu bagi ketidaksetaraan politik, sosial dan ekonomi. Ayinde (2015) mengevaluasi pertumbuhan pertanian dan tingkat kemiskinan di Nigeria dengan menggunakan analisis Arima Model dan kausalitas Granger. Ia berkesimpulan bahwa kemiskinan di Nigeria dapat diatasi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pertanian secara terus menerus. Misty Lacour (2011) mengkaji dampak kemiskinan terhadap prestasi akademik di Amerika Serikat. Ia melakukan penelitian prestasi belajar siswa kelas tiga sampai kelas lima pada 71 sekolah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa, kemudian faktor pengaruh tingkat pendidikan ibu dan kebijakan pemerintah dan tingkat pendapatan keluarga miskin.

Karena itu, menanggulangi kemiskinan dengan memperhitungkan aspek nilai dengan klasifikasi gaya hidup masyarakat (folk, desa atau kota (Dananjaja, 1988:46). Merefensi pernyataan Dove (1984) bahwa kemiskinan dan keterbelakangan terjadi karena terlampaui lama diperlakukan tidak adil dalam sejarah. Analisis Made Kerta (2016) mengenai kebudayaan kemiskinan Di Bali khususnya penduduk dikawasan wisata pegunungan Kintamani, bahwa faktor penyebab kemiskinan, pertama kebijakan pemerintah, mengacu tulisan Lewis (1966) yaitu nilai budaya yang dianut oleh kelompok miskin seperti malas, bergantung takdir dan etika kerja. Karena itu, pengentasan kemiskinan harus memberdayakan nilai lokal jenius melalui konsep hidup orang Bali Tat Tvan Asi. Sebuah doktrin kemanusiaan yang mengajarkan kesetaraan semua makhluk hidup. Demikian pula Meyer (2016) menyatakan bahwa persoalan kemiskinan sangat kompleks dan multidimensional dan karena itu pengentasannya harus difokuskan pada masalah lokal. Tulisan La Ura et all (1996) pengaruh kemiskinan terhadap kesehatan anak di Amerika. Bahwa kemiskinan sangat berpengaruh terhadap ras dan struktur keluarga. Anak yang berkulit hitam kemungkinan besar berada pada kondisi kesehatan yang buruk dibanding dengan anak dari keluarga kulit putih.

Jika mengacu tulisan diatas maka merancang sebuah kebijakan Daerah Buton haruslah disesuaikan dengan strategi swadaya setempat (*local self reliance*) yang berbasis budaya. Bagian terbesar dari mereka yang mengalami kemiskinan absolut di daerah pedesaan Kecamatan Lasalimu selatan. Seperti telah terbukti kebenarannya dengan semakin meluasnya perkampungan-perkampungan kaum miskin pedesaan, maka kaum miskin perkotaan semuanya tidak dapat membebaskan kemiskinannya dengan jalan bermigrasi ke kantong-kantong ekonomi di Kabupaten Buton. Karena itu, perlu dirancang suatu strategi swadaya keluarga miskin dan masyarakat desa-desa yang berbasis budaya.

Kehadiran pola-pola keuangan keluarga melalui arisan sebagai alternatif model pengelolaan keuangan keluarga melalui arisan, juga tak mampu dijangkau oleh keluarga miskin. Hal itu selain disebabkan karena penghasilan keluarga miskin hanya untuk bertahan hidup, tidak memiliki sisa yang dapat diakumulasikan menjadi modal untuk berarisan. Berkait dengan kondisi tersebut diperlukan pemberdayaan keluarga miskin untuk menanamkan nilai-nilai interpreneurship dan persaingan dan meninggalkan pola hidup menerima atau berpasrah diri tanpa usaha maksimal.

Kesadaran masyarakat akan kesehatannya dapat tercermin dengan melihat seberapa besar penggunaan jaminan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat juga terus diusahakan oleh pemerintah. Tercermin dari sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan dalam hal sumber daya

kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan menekankan pada Standar Pelayanan Dasar bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Kesadaran masyarakat akan kesehatannya dapat tercermin salah satunya dengan melihat seberapa besar penggunaan jaminan kesehatan.

Dengan demikian, aneka program Pemerintah sebagaimana dikemukakan diatas sebagai indikator bertahannya kemiskinan di Kabupaten Buton. Hal tersebut disebabkan model penanggulangannya terlampaui berorientasi ekonomi secara makro Top Down, tanpa dikolaborasikan sumber daya masyarakat lokal memiliki sistem pengetahuan masyarakat lokal. sementara perbedaan faktor pandangan hidup, gaya hidup konsumtif mempengaruhi jenis dan pola makanan, kepercayaan sangat bervariasi. Penyaluran bantuan diperlukan kesadaran elite birokrasi memberi contoh disiplin murni kepada warga miskin, melalui Departemen Sosial hingga elite desa berkaitan dengan penyaluran bantuan agar tidak "pilih kasih" untuk diharapkan tepat sasaran kepada warga miskin. Karena itu, model penanggulangannya diperlukan pemanfaatan sumber daya lokal secara intensif berupa kearifan gotong royong sesuai potensi desa sasaran yang berbasis sosial ekonomi masyarakat sebagai berikut

3.2. Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Sosial Ekonomi di Kabupaten Buton

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan masih bertahannya angka kemiskinan baik berdasarkan deskripsi sumber data secara kuantitatif maupun kualitatif. Karena itu, solusi konstruktif menanggulangi kemiskinan, dilakukan oleh elite birokrasi pemerintahan bersama elite tradisional lokal, tokoh masyarakat, maka perlunya dilakukan pendekatan penanggulangan berbasis kearifan sosial ekonomi rakyat kelompok lokal melalui saluran khas kearifan lokal gotong royong yang tumbuh dalam Masyarakat lokal itu sendiri sebagai berikut.

3.2.1. Pertukaran Patron-Klien

3.2.1.1. *Pokaowa* (Resiprositas)

Secara etimologi "*pokaowa*" adalah kepemilikan bersama dua orang atas satu jenis barang (wawancara). Secara terminologi *pokaowa* adalah seseorang harus membantu orang lain yang pernah membantunya sedikit-tidaknya jangan merugikannya. Makna lainnya adalah satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan bagi si penerima, satu kewajiban timbal balik untuk membalas dengan hadiah atau jasa dengan nilai yang sedikit-tidaknya sebanding di kemudian hari. Fahaman tentang pertukaran yang sepadan ini merupakan satu prinsip moral umum yang terdapat pada semua kebudayaan. Bentuk-bentuk saling bantu berupa gotong-royong di Buton yang sangat terkenal itu, secara ritual diperkuat oleh selamatan, suatu acara makan bersama yang dihadiri oleh kalangan tetangga.

Dalam pandangan Scott hubungan patron-klien (Gakin) antara kerabat tidak termasuk di dalamnya. Pandangan Scott tersebut kurang bekeseuaian dengan kenyataan pertukaran patronase di Buton. Pertukaran patronase di Buton banyak terbentuk dilingkungan kerabat. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjalin pertukaran antara seorang patron dengan Gakin di luar kerabatnya. Dalam masyarakat Buton pertukaran patronase kekerabatan merupakan hasil dari proses sosialisasi seseorang dalam hidupnya, di mana terkandung di dalamnya rasa saling percaya yang dapat dimanfaatkan olehnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan ini juga didasari atas sanksi-sanksi dari masyarakatnya. Jika ada kerabat yang tidak bertindak seperti yang diharapkan oleh kerabat lainnya dan dianggap tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan.

3.2.1.2. Pertukaran *Juraga-Sawi* (Kelompok)

Hubungan patron klien "*juraga-sawi*" menurut orang Buton adalah orang yang menjadi ikutan atau panutan, dan ini bisa seorang pemimpin sama dengan "*punggawa/ajjoareng*" (Bugis) atau pemuka masyarakat lainnya (wawancara dengan informan). Hubungan *juraga-sawi* merupakan pola hubungan pemilik perahu dengan sawinya (awaknya) yang diselenggarakan dalam kerjasama bagi hasil yang di dalamnya terdapat hubungan patron-klien. Pola hubungan ini berkembang di pelayaran perdagangan dan pelayaran penangkapan ikan. Namun pola hubungan *juraga-sawi* dapat dikembangkan di darat, di mana pemilik usaha/ tuan-tuan tanah tampil sebagai *juraga* dan Gakin tampil sebagai *sawi*.

Model hubungan *juraga-sawi* ini dapat dijadikan model budaya menanggulangi kemiskinan di Buton. Orang-orang miskin yang berada disekitar *juraga* diikutkan menjadi bagian dari pertukaran patronase koordinasi kepala Dusun. Gakin yang menjadi pengikut *juraga* dapat memperoleh berbagai bantuan dari sang *juraga*. Bantuan yang diperoleh dapat berupa materi seperti modal usaha, dan bukan materi, seperti biaya pendidikan.

Menurut tradisi di daerah Buton seorang *juraga* lebih mendasarkan dirinya pada pengaturan kekuatan serta jalur mendapatkan jabatan, dan bukan pada pewarisan kedudukan atau pemilikan tanah. Keadaan semacam ini baru mulai berubah ketika pemerintahan kolonial dan komersialisasi ekonomi mulai menjalar di Asia tenggara, dan pemilikan tanah pun kemudian menjadi landasan bagi tumbuhnya gejala patron-klien. Gejala itu semakin mendesak menguatnya patron-klien ketika tanah-tanah kerajaan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Penyerahan perubahan fungsi tanah dari kerajaan-kerajaan kepada pemerintah Republik Indonesia menyebabkan masyarakat semakin sulit memiliki tanah garapan untuk pertanian. Apalagi pertambahan jumlah penduduk tanpa diikuti dengan peningkatan lapangan kerja semakin menguatkan hubungan patron-klien.

. Dalam masa sebelumnya yang lazim kita dapatkan adalah wilayah-wilayah yang sedikit banyak bersifat mandiri (otonom), atau dengan istilah lain masih banyak terdapat lokalisasi kekuasaan, hal mana merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan oleh kerajaan-kerajaan tradisional di Buton dan kerajaan lain di Sulawesi Tenggara. Makin besar kemandirian ini, maka akan semakin penting pula arti hubungan patron dan klien. Di sini kita lihat dapat dikaitkan tidak adanya jaminan keselamatan individu dengan sistem politik yang ada.

3.2.1.3 Pande- Suka (Kelompok Kerja)

Masalah yang dihadapi oleh keluarga petani-nelayan miskin Lasalimu selatan dan Sapolawa dapat dikategorikan ke dalam 3. Pertama, bagaimana memperoleh sandang-pangan-papan. Kedua, bagaimana mengakses pendidikan pada level sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas. Ketiga, bagaimana menjadikan Gakin memiliki mentalitas membangun. Masalah tersebut dapat diatasi melalui pendekatan budaya "*kelompok kerja-pande suka*". Para petani Buton memiliki tradisi bekerja secara bersama-sama di bawah pimpinan *pan de suka* (wawancara). Pande Suka adalah wakil parabela, aparat adat Buton. Pande suka berfungsi sebagai pemimpin dan manajer petani berkebun dan bersawah.

Untuk menanggulangi kemiskinan untuk prespektif ke depan salah satu strategi yang dapat di tempuh melalui aktifitas kelompok usaha penduduk lokal. Di dalam strategi budaya itu jalur pendidikan sangat strategis untuk membangun Daerah Buton, khususnya sumber daya manusianya. Dengan membangun pendidikan berarti membangun masa depan Daerah Buton yang mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tenggara dan daerah-daerah di Indonesia. Namun disadari bahwa untuk membangun pendidikan

dibutuhkan dana yang cukup besar, karena itu dibutuhkan jalur-jalur lain untuk menunjang pembangunan pendidikan, seperti pola pokaowa, pola juraga-sawi, pola parika, dan samaturu. Nilai-nilai Kegotongroyongan selain dapat berfungsi untuk memberdayakan ekonomi rakyat juga sebagai mediator perdamaian bagi warga Buton melalui (1) menciptakan kebanggaan warisan budaya leluhur menjadi kebudayaan nasional (2) sosialisasi hubungan kekerabatan antar sub etnik lokal secara ternus menerus dan pada tingkat persekolahan hubungan kekerabatan agar dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal (3) pihak pemerintah agar lebih memberdayakan patron klien pranata tradisional sebagai wujud kearifan lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan seperti Samaturu, kaseise, pande suka, pokaowa, juraga sawi, pohamba-hamba dll. sebagaimana berakarnya Ajoareng Joa bagi etnis Bugis dimana mereka berada. Menaggulangi kemiskinan dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal juga memperhitungkan aspek nilai dengan klasifikasi gaya hidup masyarakat (folk, desa atau kota) (Dananjaja,1988). Secara politik, juga dapat merefrenasi pernyataan Dove (1984) bahwa kemiskinan dan keterbelakangan terjadi karena terlampau lama diperlakukan tidak adil dalam sejarah (prioritas strata atas tradisional).

Potensi-potensi tradisional yang konstruktif yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat desa sebagai petani atau nelayan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan seperti kearifan, kepatuhan terhadap tokoh informal, disiplin murni terhadap pekerjaan khususnya nelayan, tahan penderitaan akibat budaya kemiskinan. Perlunya merevitalisasi nilai-nilai budaya konstruktif seperti gotong royong yang masih melekat dalam kepribadian masyarakat di Kabupaten Buton. sebaliknya pula situasi transisional yang kini sedang berjalan menunjukkan bahwa sifat mentalitas menerabas salah satu indikator semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Pertambahan penduduk meningkat, Mata pencaharian semakin beraneka, pengaruh teknologi dari luar, kesejahteraan rakyat semakin tenggelam jauh dibawah garis kemiskinan. Menambah maraknya krisis multidimensional. Angka kemiskinan dan pengangguran dan masalah sosial lainnya di Kabupaten Buton adalah indikator tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat tersebut, Sementara itu potensi SDA belum yang terolah secara maksimal.

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1 Aneka program pemerintah, secara makro telah menunjukkan kerja keras menurunkan angka kemiskinan, namun pemberdayaan kearifan lokal pada masyarakat akar rumput belum dilakukan secara maksimal bahkan bermunculannya orang-orang miskin baru. selain jumlah orang miskin berada di atas tingkat kemiskinan nasional juga kualitas kemiskinan itu sendiri.
- 4.1.2 Indikator kuat bertahannya prosentase kemiskinan di Kabupaten Buton sebagai akibat dari penanganannya terlampau berorientasi pada pendekatan ekonomi, sementara faktor non ekonomi kurang menjadi perhatian khususnya faktor politik, sosio kultural.
- 4.1.3 Faktor penyebab kemiskinan terkendala dari ukuran kemiskinan yg digeneralisasi sementara perbedaan faktor pandangan hidup, gaya hidup konsumtif mempengaruhi jenis dan pola makanan, kepercayaan sangat bervariasi. Penyaluran bantuan diperlukan kesadaran elite birokrasi memberi contoh disiplin murni kepada warga miskin, melalui Departemen Sosial hingga elite desa berkaitan dengan penyaluran bantuan agar tidak "pilih kasih" untuk diharapkan tepat sasaran kepada warga miskin.
- 4.1.4 Agenda aksi implikasi gotong royong baik sifatnya tanpa pamrih maupun secara resiprosikal adalah pemanfaatan tumbuhan dedaunan seperti batang pisang sebagai

kemasan pangan atau makan tradisional yang dikemas dapat bernilai produktif oleh kelompok kelompok

4.2. Rekomendasi

- 4.2.1. Perlunya intensitas kerjasama “*satu meja*” untuk mendapatkan pemahaman interpretasi yang komprehensif antar Pemkab Buton khususnya Dinas Sosial dengan akademisi bahwa menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara multidimensi. Tidak saja berorientasi fisik kuantitatif tetapi dikuatkan nilai filosofi yang melekat dalam sistem pemikiran masyarakat lokal
- 4.2.2. Angka pengangguran dan angka putus sekolah cukup tinggi, siswa tamat SD tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang SLTP. Artinya, program “Wajib Belajar 9 Tahun” masih perlu penanganan yang serius, sebagaimana halnya dengan kemiskinan. Penanganan putus sekolah dapat diintegrasikan dengan penanganan masalah kemiskinan, oleh karena kedua masalah tersebut saling berhimpitan dan berkorelasi.
- 4.2.3. Dalam menanggulangi kemiskinan di Buton disarankan untuk menggunakan kearifan lokal yakni budaya Buton yang bernilai produktif, yaitu pertukaran pokaowa, juraga-sawi, pande suka, dan samaturu. Keempat model itu dapat dijalankan secara terpisah dan dapat pula dijalankan secara terintegrasi. Jika dijalankan dengan terintegrasi, maka keempat model itu dilengkapi dengan jalur pendidikan.
- 4.2.4. Pemerintah Kabupaten Buton khususnya Dinas Sosial, kiranya hasil Penelitian ini dapat sebagai sumbangan untuk didiskusikan kembali sekaligus dijadikan sebagai agenda aksi pemberdayaan terhadap keluarga miskin dan bukan sebagai arsip semata.

REFERENCE

- Adhi Made Kerta, 2016. The Strategy of Cultural Poverty Alleviation Based on Empowering local genius. *International Journal of Science and Research (USR)* Vol 5 Issue 11, November 2016 The Institute of Teacher Education and Training Saraswati Tabanan Bali
- Ayinde, OE, et al. 2014, Empirical Analysis of Poverty and Agricultural Growth in Nigeria. *International Journal of Agricultural Economics Management and*
- Bank Dunia , *Poverty headcount ratio at \$2.15 a day (2017 PPP) (% Of population)*
- BPS Kabupaten Buton 2023 .*Indikator Kesejahteraan rakyat Kabupaten Buton*
- BPS SULTRA : *Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)*, Maret 2023 Sumber :
- Cess, 2003, *Program Anti Kemiskinan Di Indonesia*, Jakarta, Center For Economic and Social Studies.
- Danandjaya, James, 1988. *Antropologi Psikologi* Penerbit UI Press
- Dove, Michael 1985, penyunting, *Peranan Kebudayaan Tradisional dalam Modernisasi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

- Foucault, Michel. 1977. *Power/ Knowledge: Selected Interviews & Other Writings, 1972-1977*. Editor By Colin Gordon. New York : Pantheon Books
- Kehler Johanna, 2001. Women and Poverty The South African Experience: *Journal of International's Studies* Vol 3 no 1 University Bridgewater Massachusets
- Laura, et.all. 1996. The Effects df Poverty, Race, and Family Structure on US Children's Health: *American Journal of Public Health*. 1401. Data from the NHIS, 1978 Through 1980 and through 1991: October 1996 vol.86, no 10:
- :Lacour, Misty and Laura. D Tissington 2011., The Effects of Poverty on Academic Achievement. *Eductional Research and Reviews* Vol 6 (7),pp. 522-577. Southern Arkansas University, Magnolia, Arkansas USA
- Meyer. D.F. 2016 “ Prediktor of Poverty a Comparative Analysis of Low Income Communities in the Northern Free State Region, South Africa. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*. Vol.8. no. 2, 2016 ISSN. 1309-8063. North West University (Vaal Campus) South Africa
- Mok. TY.; C Gan and Sanyal 2007. The Determrinants of Urban Houshold Poverty in Malaysia. *Journal of Social Sciences* 3(4) ISSN. Lincoln University, Conterbury, Newzealnd
- Oscar Lewis 1988, *Kisah Lima Keluarga*; Telaah telaah kasus orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan, kata pengantar Parsudi Suparlan, Yayasan Obor Indonesia
- Ritonga, A. dkk 2003. Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua . Jakarta: UI Press.
- Sayogyo 1996 memahami dan Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia: Jakarta Grasindo.
- Scott, James, C., 1994, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, Diterjemahkan oleh Hasan Basari dari Buku *The Moral Economy of The Peasant: Rebillion and Subsistence in Southest Asia*, Haven and London, Yale University Press, 1976.
- Suharto, Edy. 2021, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial D Indonesia: Mengagas Jaminan sosial Universal bidang Kesehatan
- TNP2K 2021: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : Basis Data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial.
- Xiuqing Wang, et all.,2009. China's Rural Poverty Line and Determinant of Rural Poverty *China Agricultural Economic Review* vol.1 no 3, 2009. Emerald Group Publishing Limited